

PENDIDIKAN : DI ANTARA PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN DAN LANDASAN PENDIDIKAN HINDU

I Wayan Winaja

Pasacasaria Universitas Hindu Indonesia Denpasar

Abstract

Education until now is nearly considered sacred, full of virtue, it contains oppression. Knowledge is power. Through the power of knowledge and education, eventually human found difficulties to become autonomous and independent. Humans become very dependent on knowledge oriented fanaticism "producing" technology, which eventually imprison human freedom. Empirically schooling education become very pragmatic and synonymous with technology. If mistakenly use a knowledge-based scientism, instrumentalist, and technology, it will make life on earth to be horrible.

Education should be able to deliver the man to a better life *devasya* (adult), smart intellectually, emotionally, spiritually, and have the independence of living, able to feel all the laments in the surrounding areas (the natural environment and social environment). At least make these principles as new spirit to grow the desire and the will of the students (*sisya*) to become independent, and always put great expectations towards maturity (*dewasya*), as well as the independence of living. In education must be a process of cultural inheritance through 1) teaching and learning (teaching and learning process); 2) imitation (role models); 3) habituation (habit formation). Imitation and habituation refers to the concepts of religion, to Hinduism, namely the concept of *Daiwa Sampad*, *Yama*, *Niyama*, *Madhawa*, and so forth. To realize a symbiosis of whom may be where, who may be why, there is equality between rights and obligations.

Key Words : *Education Schooling, Hindu Based Educational*

Abstrak

Pendidikan yang selama ini hampir dianggap sakral, penuh kebajikan, ternyata mengandung penindasan. *Knowledge is power*, bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Melalui pengetahuan dan kuasa pendidikan, akhirnya manusia menemui kesulitan menjadi insan yang otonom dan mandiri. Manusia menjadi sangat tergantung pada pengetahuan yang berorientasi saintisme yang "memproduksi" teknologi, yang akhirnya membelenggu kebebasan manusia. Secara empiris pendidikan persekolahan menjadi sangat pragmatis dan menjadi identik dengan teknologi. Jika keliru menggunakan pengetahuan yang berbasiskan saintisme, instrumentalis, dan teknologi, maka akan membuat kehidupan di bumi menjadi mengerikan.

Pendidikan seharusnya mampu mengantarkan manusia menuju kehidupan yang lebih *devasya* (dewasa), cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual, serta memiliki kemandirian hidup, mampu merasakan segala keluh kesah yang berada di sekitarnya (lingkungan alam dan lingkungan sosial). Setidaknya menjadikan prinsip dasar di atas, sebagai spirit baru bagi tumbuh dan berkembangnya keinginan serta kehendak anak didik (*sisya*) agar menjadi independen, dan selalu mengedepankan harapan besar menuju kedewasaan (*dewasya*), serta kemandirian hidup. Dalam pendidikan harus terjadi proses pewarisan budaya melalui 1) pengajaran dan pembelajaran (*teaching and learning process*); 2) peneladanan (*role model*); 3) pembiasaan (*habit formation*). Peneladanan dan pembiasaan merujuk pada konsep-konsep ajaran agama, untuk agama Hindu yaitu dengan konsep *Daiwa Sampad*, *Yama*, *Niyama*, *Madhawa*, dan lain sebagainya. Sehingga terwujud simbiosis siapa boleh dimana, siapa boleh mengapa, ada kesetaraan antara hak dan kewajiban.

Kata Kunci : *Pendidikan Persekolahan, Landasan Pendidikan Hindu*

1. Pendahuluan

Di dalam kebudayaan Yunani Kuno, pendidikan diilustrasikan sebagai pengolahan tanah pertanian di mana benih dapat tumbuh dengan sempurna dan menghasilkan buah. Dari ilustrasi ini pendidikan dimaknai sebagai usaha terpadu untuk memanusiakan manusia muda, membentuk karakter sehingga menjadi pribadi yang berkeutamaan, dan terpandang karena memiliki budaya intelektual. Dengan kata lain pendidikan adalah proses humanisasi, dalam arti mengolah potensi-potensi yang dimiliki seseorang untuk menjadi lebih manusiawi. Pendidikan juga dapat dipahami sebagai proses liberalisasi dalam arti bahwa melalui pendidikan potensi-potensi seseorang mengalami proses emansipasi dan pembebasan dari pelbagai bentuk penindasan dogmatis dan fatalisme yang melumpuhkan. Melalui pendidikan, seseorang dibentuk dan dibekali pengetahuan dan ketrampilan sehingga ia mampu mengembangkan potensinya untuk menjadi agen pembebasan bagi dirinya, dan bagi orang lain, serta lingkungannya. Pendidikan merupakan media untuk mencerdaskan kehidupan dan membawa manusia ke era pencerahan, memberikan pembukaan dan perluasan pengetahuan sehingga dapat mewujudkan melek ter-

hadap kehidupan. Dengan demikian pendidikan tidak hanya usaha pemberian informasi dan pembentukan ketrampilan untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi juga untuk menuju kehidupan yang *dewasya* (dewasa), *pradnyan* (cerdas) secara intelektual, emosional, dan spiritual, serta mampu merasakan segala keluh kesah yang berada di sekitarnya. (Gandhi, H.W, 2011: 19-20; Tarpin, 2008: 343-350).

Umat manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan untuk dapat secara tepat dan konstruktif berhubungan dengan lingkungan. Dimulai dari anak manusia mencapai penyesuaian jasmani (dapat berjalan sendiri, makan sendiri, menggunakan tangan sendiri) atau mencapai kebebasan fisik. Manusia harus dan wajib dididik, sebab kalau tidak ia akan kehilangan hakekat kemanusiaannya, dan akan menjadi tidak berbudaya. Sebagai sarana utama untuk memajukan kehidupan, pendidikan memberi tuntunan, bantuan, dan pertolongan kepada umat manusia. Pengertian memberi tuntunan, bantuan, dan pertolongan pada sistem pendidikan persekolahan, tersimpul suatu dasar pengakuan bahwa anak memiliki delapan potensi (kecerdasan) untuk berkembang. Potensi-potensi yang teridentifikasi yaitu 1) potensi linguistik; 2) potensi matematika; 3) potensi visual/spasial; 4) potensi kinestetik/perasa; 5) potensi musikal; 6) potensi interpersonal; 7) potensi intrapersonal; 8) potensi intuisi. Potensi ini secara berangsur-angsur tumbuh dan berkembang dalam diri anak. Untuk berkembangnya potensi-potensi (kecerdasan) agar menjadi lancar dan terarah, diperlukan pertolongan, tuntunan dari luar yaitu pendidikan persekolahan. Jika pertolongan tidak ada, maka potensi/kecerdasan tersebut tinggal potensi belaka yang tak sempat diaktualisasikan. Dalam hal ini pendidikan harus memberikan keseimbangan aktivitas terhadap otak kanan dan otak kiri sehingga kecerdasan antara logika dan rasa menjadi padu dan seimbang. Pendidikan harus bersifat utuh dan komprehensif, harus mampu mengembangkan nalar, dan harus juga mampu mengembangkan potensi rasa. (Hernacki, 2003:31- 38; Ihsan, 1996:2; Suprayogo, 2013: XVI; Tarpin,2008: 343-345).

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat menghasilkan individu yang dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu hidupnya. Hal ini terjadi apabila bentuk kegiatan pendidikan mempunyai tujuan yang tepat. Dalam konteks ini pendidikan adalah proses transformasi diri dari sikap *ignorant* menuju kesadaran kritis atas apa yg terjadi dalam diri dan lingkungannya. Disamping itu dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan manusia untuk menjadi agen perubahan sosial. Melalui pendidikan yang transformatif dan partisipatif, diharapkan mampu mengembangkan dimensi individual dan sosial secara seimbang. Pendidikan yang rumusan tujuannya tidak tepat akan memunculkan tujuan pendidikan yang tidak benar pula. Tujuan pendidikan dikatakan tidak benar apabila berisi nilai-nilai hidup yang bersifat mengingkari dan merusak harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial, individual, serta hamba Tuhan Yang Maha Esa.

Saat ini pendidikan persekolahan telah dipercaya menjadi sesuatu yang diterima sebagai kebenaran aksiomatis, dipandang sebagai sesuatu yang penting serta mesti ada dalam keberlangsungan hidup manusia di mana pun berada dari waktu ke waktu. Kepercayaan ini begitu klasik sehingga sulit bagi siapapun untuk mengetahui sejak kapan manusia mulai menaruh optimisme dan kepercayaannya pada pendidikan persekolahan. Di Eropa misalnya, keyakinan dan kepercayaan terhadap pendidikan persekolahan, kemudian memunculkan sesuatu seperti *school*, *pedagogie*, *education*, dan *andragogie*. Sementara di dunia Timur ditemukan juga hal yang sama seperti *madrasah*, *pesantren*, *padepokan*, *grahavidya*, *pesraman*, yang semuanya merujuk pada tempat atau wahana pendidikan (Gandhi, H.W, 2011: 19-20; Mudyahardjo (2001:37).

Melalui sistem *school*, *pedagogie*, *education*, dan *andragogie*, lulusan lembaga pendidikan saat ini, menjadi profesional, tetapi tidak atau kurang peduli terhadap tanggung jawab etisnya, telah muncul gejala-gejala semakin langkanya sosok pribadi yang beradab, punya wawasan generalis, seimbang kepribadiannya. Apa yang dilakukannya sering tidak memperhatikan dampak yang sangat luas bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Contoh sederhana pemanfaatan sinar laser dalam berbagai even untuk kepentingan dunia ekonomis. Dari salah satu contoh ini tersirat bahwa libido ekonomi begitu kuat pada masyarakat terdidik saat ini. Kualitas pendidikan persekolahan, dimanifestasikan dengan kehidupan manusia yang semakin bergelimang materi. Makna kehidupan ditentukan oleh kehidupan ekonomi. Demikian pula berbagai sektor kehidupan diukur dengan nilai-nilai ekonomis. Hal ini tentu sangat tidak relepan bila dibandingkan dengan ajaran pendidikan persekolahan, yang tersurat dalam landasan pendidikan Hindu. Ajaran pendidikan persekolahan menenkankan terciptanya *sisya* yang *dewasya*, sesuai aja-

ran *Dewi Sampad*. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji pendidikan diantara pendidikan persekolahan dan landasan pendidikan Hindu.

2. Pembahasan

2.1 Pendidikan Pesekolahan

Pendidikan persekolahan merupakan wahana untuk mengkritisi kebenaran yang telah ada dalam konteks dialogis antara pendidik persekolahan dengan peserta didik (*sisya*). Pendidikan persekolahan bukanlah hanya sebuah tempat untuk memperoleh pengetahuan atau informasi sebanyak-banyaknya. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu, bahwa pendidikan persekolahan dalam konteks kajian manajemen persekolahan, adalah sekelompok orang atau manusia, sejumlah sarana, prasarana, serta kerja sama yang dilakukan oleh kelompok orang bersangkutan untuk mewadahi para peserta didik (*sisya*) dan guru (*guru pengajian*), sama-sama belajar dan sama-sama mengamati apa yang terjadi di sekeliling dirinya dan terlebih lagi pengamatan terhadap diri mereka masing-masing. Berangkat dari wacana di atas dan jika dikaitkan dengan fungsi-fungsi manajemen, maka pihak manajemen sekolah seharusnya mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan peserta didik (*sisya*), baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Dalam arti, manajemen sekolah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan peserta didik (*sisya*), melalui peraturan sekolah, otoritas guru (*guru pengajian*), disiplin kerja, cara belajar, kebiasaan bergaul, serta bermacam-macam tuntutan serta kesenangan belajar peserta didik (*sisya*), melalui fungsi-fungsi manajemen pendidikan persekolahan. Fungsi-fungsi manajemen dimaksud adalah, 1) perencanaan; 2) pengorganisasian; 3) pengarahan; 4) pengkoordinasian; 5) pengontrolan /evaluasi.

Ketika pendidikan persekolahan hanya menjejali para siswa (*sisya*) dengan sejumlah informasi, dan menggeser faktor dialogis, serta menghilangkan nilai kritis, berarti pendidikan persekolahan telah berbelok haluan sekedar menjadi fungsi *drill* dan berfokus pada hal-hal yang praktis. Seperti teori Positivisme yang dirintis oleh Auguste Comte (1798-1857) yang menyatakan bahwa Positivisme menganggap pengetahuan mengenai fakta objektif sebagai pengetahuan yang sah dengan menyingkirkan pengetahuan yang melampaui fakta-fakta indrawi (Hardiman, 2008:26; Supratiknya, 2009:3).

Ditinjau dari pendidikan kritis maka hal ini akan berakibat pada terbangunnya model pendidikan persekolahan yang pragmatis yang menghasilkan sikap, 1) praktis (*practicality*); 2) kerja keras (*workability*); 3) mempunyai nilai uang (*cash value*); 4) personalisme dan dinamisme; 5) menolak kepasrahan (*agresive*); 6). pasti bisa kalau ada kemauan; 7) menjelajah (*achievement status*); 8) alam sebagai objek; 9) demokrasi; 10) sekularisme. Dengan demikian pendidikan persekolahan secara tidak langsung membangun pemikiran bahwa pendidikan persekolahan merupakan sarana untuk mencari pekerjaan, “mimpi-mimpi indahpun” terbangun didalamnya. Seperti bersekolah untuk menjadi dokter, insinyur, pejabat, dan lain sebagainya yang berprinsip seperti uraian di atas. Padahal bersekolah adalah kegiatan diri untuk dapat dan sanggup menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab diri. Bersekolah bukan semata-mata untuk mencari pekerjaan tetapi untuk mempersiapkan diri menjadi pelaku di dalam kegiatan hidup (Dewey, 2001:23-28; Suwati, 2008:2-6)

Indonesia sebagai negara yang sedang melakukan pembangunan di berbagai sektor termasuk mental, menganalogkan pembangunan dengan proses industrialisasi. Karena itu pengertiannya dianggap sama. Proses industrialisasi dan pembangunan, sebenarnya merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju, maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Selain itu industri dan pembangunan juga tidak lepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam dan sumber daya lainnya. Sering terdengar bahwa industri dan pembangunan mempunyai peran sebagai sektor pemimpin (*leading sector*). *Leading sector* ini maksudnya adalah dengan adanya pembangunan atau industri maka akan memacu dan meningkatkan sektor-sektor lainnya, seperti sektor pendidikan, pertanian, jasa, pariwisata, periklanan, dan lain sebagainya (Arsyad, 2007:329-330).

Namun tanpa disadarai, pembangunan/industrialisasi menjadikan manusia semakin *mobil*, berlibido ekonomi. Berkenaan dengan itu, manusia akhirnya mengejar kemajuan tanpa batas, yang dituntun oleh kesucian ilmu pengetahuan (modern) dan pembangunan/ industri yang menjadi dambaan, sehingga menimbulkan dampak penghancuran terhadap kehidupan tanpa ada penilaian seberapa cepat dan se-

berapa banyak keanekaragaman kehidupan di planet ini mulai lenyap (Shiva, 1997). Pemanfaatan sumberdaya alam secara maksimal, sampai melebihi daya dukung, akan menimbulkan degradasi kualitas sumberdaya alam. Seperti pembangunan di sektor pariwisata yang sangat haus akan lahan dan sumberdaya alam. Belum terhitung lagi adanya berbagai masalah sosial budaya sebagai akibat dari pembangunan dan Globalisasi, yang sering menimbulkan “biaya-biaya manusiawi” atau biaya sosial (*social cost*), yang bisa menimbulkan “menyusutnya kebudayaan” atau (*cultural loss*). Sehingga banyak orang kehilangan makna dan pegangan hidup. Banyak gejala sosial yang menimbulkan biaya sosial, seperti munculnya budaya citra, budaya materialistik, konsumtif, yang pada gilirannya menyokong, kedikasmaraan sosial, dan kemiskinan.

Pembangunan yang awalnya diniatkan untuk mensejahterakan umat manusia akhirnya menjadi menyengsarakan. Seperti contoh pembangunan jalan di seputaran kota Denpasar (Gatot Subroto, Tengku Umar, By Pass I Gusti Ngurah Rai, dan jalan Prof. Ida Bagus Mantra). Banyak diantara pemilik lahan untuk kepentingan pembangunan, kesejahteraannya tidak signifikan dengan hilangnya sumberdaya alam yang dimiliki. Yang paling terkena dari kondisi ini adalah angkatan muda yang dibesarkan di tengah suatu kevakuman kebudayaan dan nilai. Tradisi lama dibuang begitu saja, dianggap sebagai sesuatu yang usang demi mengejar “modernisasi”. Kebudayaan “Barat” pun yang dianggap modern hanya dijiplak dan ditiru secara lahiriah, seperti mengkonsumsi minuman “keras”.

Pembangunan pendidikan persekolahan saat ini pun tidak lepas dari pengaruh modernisasi. Sehingga terbangun pemahaman nilai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tinggi sama dengan pinter. Sedangkan nilai Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tinggi, nilai pelajaran bahasa tinggi, nilai IPA rendah, memiliki padanan sama dengan tidak pinter. Berdasarkan penelitian penulis di kota Denpasar, bahwa masyarakat memiliki kecenderungan agar putra putrinya memiliki pengetahuan yang lebih di bidang IPA, dibandingkan dengan non IPA. Dengan alasan bahwa IPA sebagai pendukung dari teknologi, dan yang menguasai teknologi itulah yang akan *survival* dalam menghadapi masa depan. Inilah salah satu kekeliruan hasil pendidikan persekolahan kita. Kondisi seperti ini merupakan kondisi yang di dalamnya hampir seluruh energi dipusatkan bagi pelayanan “hawa nafsu” yang pragmatis, sehingga pengejaran kebendaan, kekuasaan, ketenaran, popularitas, kecantikan, kebugaran, keindahan, dan kesenangan, menjadi sebuah pencarian yang tak pernah berkesudahan, bagaikan hidup di “alam Dewa” yang serba berlimpah. (Berger, 1982; Palguna, 2007; Piliang, 1998).

Institusi pendidikan formal, seperti pendidikan persekolahan memang penting sebagai arena untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, tetapi institusi pendidikan persekolahan yang pada awalnya diniatkan untuk memberdayakan masyarakat, dalam sistem modernitas justru menjadi sebuah lembaga yang tidak memungkinkan bagi keturunan orang-orang miskin, dan *papa*, untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian pendidikan persekolahan nyaris hanya dinikmati oleh para elite yang termasuk kategori tingkat atas. Membendung anak-anak orang miskin untuk bersekolah, caranya dengan dilakukan seleksi yang sangat kompleks dan ketat. Dengan cara seperti itu anak-anak orang miskin menjadi tidak mampu bersaing secara jantan. Jangankan bersaing, untuk mengikuti ujian masuk saja mereka sudah kalah duluan, karena tidak memiliki biaya untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan bimbingan sebagai senjata untuk memasuki pendidikan persekolahan. Persaingan, seleksi, kualitas, biaya tinggi, dan efisien adalah kata-kata sakral dalam modernitas pendidikan persekolahan. Manusia atau anggota masyarakat yang tidak memiliki *skill* atau ketrampilan atau keunggulan kompetitif harus tersingkir dan termarginalkan (di sini berlaku hukum rimba). Hasil kajian ini telah memberikan inspirasi bahwa pada pendidikan persekolahan berlaku hukum rimba. Di sisi ini telah terjadi malpraktik. Malpraktik pendidikan persekolahan yang dimaksud, pertama kecenderungan pendidikan persekolahan yang semakin elitis dan tidak terjangkau oleh rakyat miskin; kedua, manajemen pendidikan masih birokratis dan hegemonik, sehingga kebijakan yang lahir tidak mendukung terwujudnya pendidikan yang emansipatoris, dan dialogis (Dawam, 2003; Darmaningtyas, 2005).

Padahal pendidikan adalah salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia agar menjadi manusia yang terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, sampai pada ketertinggalan. Oleh karena manusia sebagai pusat pendidikan, maka manusia harus menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang bermartabat. Namun tanpa disadari pendidikan persekolahan menjadi alat “pemerkosanya” peserta didik (*sisya*). Dikatakan bahwa pen-

didikan persekolahan yang selama ini hampir dianggap sakral, penuh kebajikan, ternyata mengandung penindasan”. Hal ini sejalan dengan gagasan Foucault (2002) *knowledge is power*, bahwa pengetahuan adalah kekuasaan, tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Melalui pengetahuan dan kuasa pendidikan, akhirnya manusia menemui kesulitan menjadi insan yang otonom dan mandiri. Yang akhirnya manusia menjadi sangat tergantung pada pengetahuan yang berorientasi saintisme yang “memproduksi” teknologi. Teknologi dengan instrumentalisi yang positif di segala sesuatu, telah menjadi belenggu kebebasan manusia. Jika keliru menggunakan pengetahuan yang berbasiskan saintisme, instrumentalis, dan teknologi, maka akan membuat kehidupan di bumi menjadi mengerikan. (Foucault, 2002; Prieire, 2002; Karim, 2009; O’neal, 2008).

Secara pragmatis kita tentu tidak bisa menghindari dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tetapi kita juga harus pandai-pandai menggunakan teknologi. Teknologi ibaratnya pisau bermata dua, apabila salah menggunakan maka akan menjadi bumerang. Ironisnya lagi, pasca reformasi yang diharapkan mampu membawa angin perubahan bagi dunia pendidikan, ternyata hanya menjadi wacana politik sehingga pendidikan di Indonesia tidak beranjak dari persoalan-persoalan yang semakin parah dan amburadul. Adanya kebijakan otonomi pendidikan yang kemudian memberikan hak sepenuhnya kepada setiap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan, maka ini memberikan satu bukti konkret, pendidikan berada dalam kerentanan komersialisasi pendidikan, sehingga menjadi keniscayaan apabila pendidikan pun menjadi komoditas yang siap diperjualbelikan dengan harga yang sangat tinggi.

2.2. Landasa Pendidikan Hindu

Agama Hindu mengenal Ajaran *Catur Asrama*, yaitu empat tahapan hidup dalam menjalani kehidupan. Keempat tahapan hidup itu, dimulai dari *Brahmacari*, masa dimana manusia Hindu menjalani kewajiban menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan (*vidya*), agar terhindar dari *avidya* (kegelapan). Tahap *Brahmacari* (menuntut ilmu) peserta didik (*sisya*) dididik oleh guru yang disebut *Acarhya* dan juga disebut *Panembahan* sesuai kitab *Brahmandapurana* 75.20; dan *Agastyaparwa* 353.21; 365.12. Tahap kedua *Grahasta*, tahapan manusia Hindu membangun rumah tangga yang *sukinah*. Setelah membangun rumah tangga, maka dilanjutkan dengan tahapan *Wanaprastha*, tahap mempersiapkan diri untuk melepaskan diri dengan *ikatan duniawi* (kehidupan dunia). Tahap keempat disebut *Bhiksuka/Sanyasin* adalah tahap melepaskan diri dengan ikatan duniawi.

Menurut pendidikan Hindu ada tiga sumber ilmu pengetahuan, yaitu 1) *sastratah* (pengetahuan yang bersumber dari kitab suci/*susatra*); 2) *acharya wakya* (pengetahuan dari kata-kata bijaksana sang *acharya/guru*); 3) *swatah* (pengetahuan yang bersumber dari pengalaman pribadi), salah satunya melalui praktik (*sadhana*). Mengacu kepada sumber di atas, maka pendidikan hendaknya dibangun dengan empat pilar yaitu, keluarga (*kawulawarga*), sekolah (*pesraman*), pemerintah (*wasatkara*), spiritual (*agama*), sesuai dengan konsep *Catur Guru*. Keluarga merupakan institusi pertama (*bassic need*) dalam membina pendidikan bagi para putra manusia Hindu. *Sisya* yang tidak lain adalah Putra, yang menurut Hindu, Putra adalah mereka yang akan mengangkat orang tua dari penderitaan (*papa, neraka*). Putra berasal dari kata *Tra(na)*, yang berarti pembebasan. Jika orang tua tidak memberikan pendidikan yang baik kepada putra putrinya, maka di akhir hidupnya ia akan menderita. Begitu sebaliknya, jika orang tua memberikan pendidikan yang baik kepada putra putrinya, maka putra putrinya akan menjadi suputra dan akan membuat keluarga menjadi bahagia. Di dalam keluarga ibu memegang peran yang sangat penting dalam pendidikan bagi putra putrinya. Seorang ibu harus mengawali pendidikan sejak putranya dalam kandungan (*prenatal*) hingga akhir hayatnya. Dalam *Reg Wedha V* disebutkan bahwa kedudukan istri/wanita sangat terhormat, istri/wanita sesungguhnya adalah sarjana/pendidikan (Punia Atmadja, 1976 dalam Sedyawati, 1991; Di Redja, 1921).

Kitab *Nitisastra* (IV.20; V.1; VI.1), menyebutkan tentang perlakuan yang harus diterapkan kepada anak (putra) adalah sebagai berikut 1) bayi sampai anak berusia kurang dari lima tahun hendaklah diperlakukan sebagai dewa; 2) anak yang sudah berusia lima sampai kurang dari tujuh tahun diperlakukan seperti halnya anak raja; 3) tetapi jika anak sudah berusia tujuh tahun sampai kurang dari 16 tahun mulai dilatih agar suka menurut dan suka belajar “budak”; 4) sesudah berumur 16 tahun sampai belum menikah hendaklah perlakukan mereka sebagai sahabat, dan jika hendak menunjukkan kesalahannya harus dilakukan dengan hati-hati; 5) jika anak sudah berkeluarga dan sudah mempunyai keturunan hen-

daknya diamati saja tingkah lakunya, dan kalau memberi pelajaran kepadanya cukup dengan bahasa tubuh saja dan dengan kosep *tut wuri handayani*. Ditegaskan pula jangan sekali-sekali memanjakan anak, apabila dimanjakan anak akan menjadi jahat dan pasti ia akan menyimpang dari jalan yang benar. Jika menggunakan peraturan ketertiban dan hukuman yang seksama, maka anak akan baik perangainya, dan akan berpengetahuan. Anak semacam ini akan dihormati, disayangi, dicintai, serta dihargai oleh orang baik-baik. Dari keterangan di atas jelas bahwa pendidikan terhadap anak sudah mulai diterapkan sejak anak masih bayi hingga mereka dewasa (Sedyawati, 1991).

Dalam pendidikan Hindu selalu dibangun keseimbangan/keharmonisan (*Hita*). Termasuk di dalam proses pembelajaran antara orang tua/ guru (*acharya*) dengan anak didik (*sisya/putra*). Ketika orang tua/guru (*acharya*), melakukan kewajiban memberikan pendidikan, orang tua/guru (*acharya*) melayani *sisya (putra)* dengan penuh ketulusan hati memberikan pendidikan yang baik kepada *sisya/putra*, agar menjadi *sisya/putra* yang *suputra* (berpengetahuan, berbudi baik, dan bhakti), serta dewasa (*dewasya*) sesuai ajaran *Daiwa Sampad*. Begitu sebaliknya *sisya(putra)* dengan penuh *bhakti*, tekun mengikuti ajaran dan anjuran *Dang Acharya/Panembahan*. Putra yang *suputra*, *dewasya*(dewasa) akan membuat keluarga menjadi bahagia (*nemu bagia*). Bahkan dalam kitab *Slokantara* (VI.38) dikatakan bahwa orang yang berkorban (*meyajna*) seratus kali, kalah hasilnya oleh seorang *sisya/putra* yang berbudi baik (*dewasya*), maka *sisya/putra* harus diberikan tugas utama agar memiliki juga kewajiban. Kewajiban utama seorang *sisya* seperti ditegaskan dalam kitab *Nitisastra* (IV.20; V.1; VI.1), adalah belajar menuntut ilmu, dengan selalu mencari keutamaan, serta menunda kesementaraan. Dari keharmonisan yang terbangun antara orang tua/guru (*acharya*) dengan *sisya/putra* maka terbangun pula proses pendidikan yang *devalaya*. Pendidikan yang membangun kesadaran pengakuan tentang manusia sebagai tempat pemujaan (*bhakti dan sradha*) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada proses pelayanan kepada *sisya/putra* dan bhakti kepada orang tua/guru (*acharya*). Pelayanan dan bhakti kepada sesama adalah perwujudan dari pengakuan tentang manusia sebagai tempat pemujaan (*bhakti dan sradha*) kepada Tuhan Yang Maha Esa (Puja, 2004).

Seperti telah di uraikan di atas bahwa tujuan pendidikan menurut pendidikan Hindu adalah menjadikan *sisya* menjadi lebih Dewasa. Dewasa berasal dari bahasa Sanskerta *Dewasya*, yang mempunyai arti sifat *Kedewataan (Daiwa Sampad)*. *Daiwa* yang penyebutannya disingkat menjadi Dewa, adalah sinar suci Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang yang memiliki sifat *kedewataan* akan mempunyai kecemerlangan dalam segala hidupnya. Menurut Bhagawad Gita XVI. 1-3, ada dua puluh tujuh sifat *Kedewataan (Daiwi Sampad)*, sebagai ciri manusia Hindu yang *Dewasya*, setelah menyelesaikan tahap hidup *Brahamacari* atau telah menyelesaikan pendidikan. Kedua puluh tujuh ciri sifat kedewataan itu, diantaranya 1) *abhayam* (berani, tak gentar karena benar); 2) *sattwasamsuddhir* (berhati murni); 3) *jnana yoga* (bhakti dalam pengetahuan); 4) *vyavasthitih* (mantap dalam ilmu); 5) *danam* (dermawan); 6) *dama* (mengendalikan indria-indria); 7) *yadnya* (mau berkorban suci/tulus ikhlas); 8) *svadhyaya* (gemar mempelajari kitab suci); 9) *tapah* (meditasi, pengekangan nafsu); 10) *arjawam* (kejujuran); 11) *ahimsa* (tidak menyakiti, tanpa kekerasan); 12) *satyam* (menjunjung kebenaran, jujur); 13) *akrodhah* (tidak pemaarah); 14) *tagya* (tanpa egoisme, tanpa keterikatan); 15) *santih* (tenang, cinta kedamaian); 16) *apaisunam* (tidak memfitnah); 17) *daya bhutesu* (menyayangi semua makhluk); 18) *aloluptwam* (tidak bingung oleh keinginan); 19) *mardawam* (lemah lembut); 20) *hrih* (sopan); 21) *acapalam* (berkeimbangan hati); 22) *tejah* (cekatan, giat, kuat); 23) *ksama* (pemahap); 24) *dhrtih* (tabah, teguh iman/bhakti); 25) *saucam* (suci, berbudi luhur); 26) *adrohah* (tidak berkedengkian, tidak iri hati dan tidak dendam); 27) *natimatita* (tidak angkuh/ sombong).

Lembaga pendidikan (*pesraman*) merupakan salah satu sarana untuk menjadikan umat manusia memiliki kesucian, kebijaksanaan, dan keindahan. Mencapai tujuan pendidikan seperti uraian di atas maka di setiap penyelenggara pendidikan (*pesraman*), mengharuskan para *sisya* taat pada aturan-aturan tingkah laku seorang murid yang disebut *siksa sisyakrama*. *Siksa Sisyakrama* berupa aturan tentang tingkah laku yang baik (*astiti silakrama*), aturan berkhakti/mendengarkan ajaran kepada guru (*guru-susrusa*), senantiasa berkelakuan terpuji (*susilasthiti*), serta wajib memehami susastra (*wruh ing kawi*). Aturan lainnya yang harus dilaksanakan oleh para *sisya*, dan *acharya*, berupa disiplin (*yama*), kepatuhan (*niyama*). *Yama*, terdiri dari *ahimsa* (tanpa kekerasan), *brahmaacharya* (pengendalian nafsu), *astegrha* (tidak mencuri), dan *aphigrha* (tanpa kemewahan). Sedangkan *Niyama* terdiri dari *suci* (pemurnian luar

dan dalam), *santosa* (keteguhan dan kepuasan), *tapas* (pengendalian), *swadaya* (belajar mandiri), dan *iswarapranidana* (penyerahan diri secara ikhlas). Dengan landasan pendidikan Hindu seperti uraian di atas, pendidikan menurut Hindu memiliki tujuan mengubah seseorang yang biasa (*manawa*), menjadi manusia yang mempunyai nilai kebajikan lebih tinggi (*madhawa*) manusia setengah dewa. *Madhawa* akan dapat melahirkan keunggulan moral, dengan spirit *svaha*, *dhavala*, *nihsesa jadyapakah*, dan *deva-laya*, yang sanggup menjunjung kebenaran, mewujudkan kemurnian pikiran, kesucian jiwa, serta menghargai manusia sebagai tempat pemujaan Tuhan (Sedyawati, 1991).

3. Simpulan

Albert Einstein pemikir besar masa lampau menyatakan bahwa, ilmu untuk memudahkan hidup, agama untuk mengarahkan hidup, dan seni untuk menghaluskan hidup. Berpijak dari pemikiran ini, hendaknya ilmu pengetahuan dijadikan media, agama dijadikan pedoman, dan seni dijadikan estetika hidup, agar perjalanan hidup menuju sasaran menjadi lebih mudah, indah sesuai yang diarahkan oleh agama. Kemudahan yang diperoleh atas kemajuan ilmu pengetahuan dari pendidikan persekolah (pendidikan *guru pengajian*) tidak boleh menimbulkan kemalasan, merugikan orang lain, dan alam sekitarnya. Penerapan ilmu harus dan wajib dibarengi dengan penyiapan mental, supaya memiliki komitmen, tanggung jawab etik, dan tidak manja, atas kemudahan tersebut. Agama, ilmu, dan seni, harus diterapkan secara terpadu dan tepat sehingga benar-benar berdaya guna meningkatkan kualitas kehidupan manusia, menjadikan manusia yang humanis, *werdhisiah* (*civil society*). Manusia yang berkualitas, humanis, *werdhisiah* (*civil society*) akan memiliki tanggung jawab pada *swadharma* (kewajiban), moral, dan etik, terhadap lingkungan alam, dan lingkungan sosial. Dinamika hidup akan semakin indah, seimbang, harmonis, dan produktif, menghasilkan nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai material yang seimbang, dan berkelanjutan (*sustainable*). Keseimbangan antara eksistensi mental spiritual dengan fisik material itu, akan menunjang kegiatan hidup, baik yang bersifat fisik maupun mental spiritual. Dengan demikian ilmu pengetahuan harus dilandasi agama, diterapkan dengan cara-cara yang indah, halus, dan humanis. Ilmu dan agama harus seiring dan sejalan. Apabila tidak seiring dan tidak sejalan antara ilmu dan agama, diyakini akan banyak memunculkan kasus-kasus kekerasan, seperti kekerasan sosial, dan kekerasan terhadap alam. Kekerasan yang paling mengerikan adalah kekerasan “rasa” sebagai akibat dari kecemasan dan ketakutan yang mendalam umat manusia, atas hasil karyanya yang akan memusnahkan kehidupan di muka bumi (Hiroshima, Nagasaki, Chernobil, Fokushima, dan ribuan rudal berhulu ledak nuklir yang disimpan negara-negara “penakut” dan negara ambisius, sebagai kasus). Signifikansi di atas sebagai akibat dari ilmu yang buta dan agama yang lumpuh. Agama hendaknya jangan diterapkan berdasarkan rasa dan keyakinan semata. Pertimbangan akal sehat dan kesadaran budhi harus ada di dalamnya sebagai acuan. Demikian juga dalam mengamalkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan harus dengan arahan nilai-nilai spiritualitas agama dan juga diaplikasikan dengan cara-cara yang indah, halus, dan humanitis.

Memperhatikan uraian seperti di atas, maka seni harus menjadi wadah untuk mengimplementasikan kebenaran ilmu pengetahuan dan kesucian agama, sehingga hidup menjadi indah, dan terbangun kehalusan budhi. Kebenaran ilmu pengetahuan harus disuarakan secara jujur dengan penuh *satya*, dan mematikan narasi agung *knowledge is power*. Itu artinya bahwa pendidikan harus dapat melahirkan *sisya* yang memiliki keseimbangan kecerdasan antara *raiso* dan *rasa*. Ditinjau dari pendidikan kritis model pendidikan persekolahan saat ini adalah model pendidikan yang pragmatis yang menghasilkan sikap 1) praktis (*practicality*); 2) kerja keras (*workability*); 3) mempunyai nilai uang (*cash value*); 4) personalisme dan dinamisme; 5) menolak kepasrahan (*agresive*); 6) pasti bisa kalau ada kemauan; 7) menjelajah (*achievement status*); 8) alam sebagai objek; 9) demokrasi; 10) sekularisme. Dengan demikian muncul pemahaman bahwa sekolah menjadi “tempat” untuk mencari pekerjaan, “mimpi-mimpi indahpun” terbangun didalamnya. Seperti sekolah untuk menjadi dokter, insinyur, pengusaha, dan lain sebagainya yang berprinsip seperti uraian di atas. Padahal bersekolah adalah kegiatan diri untuk dapat dan sanggup menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab diri.

Menyatukan perbedaan norma pada dua idealisme yang berbeda seperti uraian di atas agar tidak terjadi *cultural lag*, maka dalam proses pendidikan harus terjadi proses pewarisan budaya melalui 1) pengajaran dan pembelajaran (*teaching and learning process*); 2) peneladanan (*role model*);

3) pembiasaan (*habit formation*). Ketiga hal yang ada pada proses penbudayaan tidak boleh berdiri sendiri, lepas satu dengan yang lainnya tetapi harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Pengajaran dan pembelajaran tanpa peneladanan dan pembiasaan tidak akan bermakna apa-apa, bagaikan *kulkul* (kentongan) di tengah ladang. Sekeras apapun dipukul tidak ada yang mendengarkan sehingga tidak ada yang mau tunduk dengan isyarat bunyi *kulkul*. Sangat berbeda dengan *kulkul* di balai banjar, sedikit saja dipukul semua orang mendengarkan, dan akan pasti tunduk dengan isyarat yang keluar dari bunyi *kulkul*. Apakah *kulkul bulus* tanda bahaya, atau suara *kulkul* karena ada upacara, dan apakah suara *kulkul* isyarat ada *sangkep/pesamuan* (rapat). Demikianlah maka ketiga komponen dalam proses pewarisan budaya pada sistem pendidikan harus menyatu, sehingga pendidikan tidak kering dari konsep-konsep budaya yang bersumber dari ajaran agama. Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab *tiga guru* yaitu, orang tua, sekolah, dan pemerintah (*guru rupaka/kulawarga, guru pengajian/pesraman, dan guru wisasa*) dengan seperangkat *hard wear*, dan *soft wear*, serta *suplement local wisdom* dan *local genius*. Peneladanan dan pembiasaan merujuk pada konsep-konsep ajaran agama, untuk agama Hindu yaitu dengan konsep *Daiwa Sampad, Yama, Niyama, Madhawa*, dan lain sebagainya. Sehingga terwujud simbiosis siapa boleh dimana, siapa boleh mengapa, ada kesetaraan antara hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Liknocolin. 2007. *Pembangunan dan Pendidikan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN
- Berger, Peter L. 1982. *Piramida Kurban Manusia*. Jakarta: LP3ES
- Darmaningtyas. 2005. *Pendidikan Rusak-Rusakan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Dawam, Aunnoropi. 2003. *Emoh Sekolah, Menolak "Komersialisasi Pendidikan" dan "Kanibalisme Intelektual" Menuju Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: INSPIEL AHIMSAKARYA PRESS. (Dewey, 2001:23-28.
- Dewey, Jhon. 2001. *Agama Pragmatis Telaah atas Konsepsi Agama John Dewey*. Magelang: Indonesiaterra.
- Di Redja, Raden Poera. 1921. *Ilmoe Pendidikan*. Manondjaja: Balai Poestaka
- Foucoult, Michel. 2002. *Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting Foucoult*. Yogyakarta: Jalasutra. (Gandhi, H.W, 2011: 19-20;.
- Gandhi, HW Teguh W. 2011. *Filsafat Pendidikan. Mazhab-Mazhab Filsafat Pendidikan*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Hardiman, F.Budi. 2008. *Kritik Ideologi Menyikap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius
- Hernacki, Mike; Bobbi De Porter. 2003. *Quantum Learning*. Bandung: Mizan Pustaka
- Ihsan, H.Fuad. 1996. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Karim, M. 2009. *Pendidikan Kritis Transformatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA Mudyahardjo, Redja.2001. *Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- O'neal, William F. 2008. *Ideologi Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Palguna, IBM Dharma. 2007. *Budaya Kepintaran Sampai Budaya Kekerasan*. Mataram: Sadampatyaksara
- Piliang, Yasraf Amir. 1998. *Dunia yang Dilipat Realitas Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*. Bandung Misan.
- Prierre, Paulo. 2003. *Menggugat Pendidikan*. Diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Puja, G. 2004. *Bhagawad Gita (Pancamo Weda)*. Surabaya: Paramita
- Sedyawati; Zainuddin,M; Wuyantoro, Edhie. 1991. *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Sebelum Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat*. Jakarta: Depdikbud, Direktorat Jarahnitra
- Shiva, Vandana. 1997. *Bebas Dari Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Konphalindo
- Supratiknya, Augustinus. 2009. "Pendidikan Humaniora" . Educare Wahana Komunikasi Pendidikan. No.9/VI/ Desember 2009. Jakarta: Komisi Pendidikan KWI
- Suprayogo, H. Imam, Prof.Dr. 2013. *Pengembangan Pendidikan Karakter*. Malang: UIN-Maliki Press
- Suwati. 2008. *Sekolah Bukan Untuk Mencari Pekerjaan*. Jakarta: Pustaka Grafia
- Tarpin, Laurentius. 2008. *Humanisme dan Reformulasi Praksisi Pendidikan*. Dalam Bamabang Sugiharto (Ed). Yogyakarta: Jalasutra.